



**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MELALUI PROGRAM SEKOLAH  
LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI KECAMATAN  
PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI**

**Muhammad Bayu Adjie, Haura Atthahara, Dadan Kurniansyah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak**

Kecamatan Pebayuran memiliki luas lahan pertanian terbesar di Kabupaten Bekasi, banyaknya lahan maka banyak pula hama yang menyerang. Banyaknya lahan pertanian menjadi faktor banyaknya kelompok tani yang ada, namun 70% dari anggota kelompok tani merupakan petani penggarap yang dimana mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Hal ini yang membuat Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi memberikan program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok tani dalam menghadapi serang hama. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mencoba melihat ketujuh tahapan-tahapan pemberdayaan dari program SLPHT, yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan program atau kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan, tahap terminasi. Hasil dari penelitian ini peneliti mendapat kesimpulan bahwa pemberdayaan pada kelompok tani melalui program SLPHT ini sudah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat pada kelompok tani di kecamatan Pebayuran. Namun ada beberapa faktor penghambat, yaitu jumlah petugas penyuluh yang terbatas dan bencana alam seperti banjir.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, kelompok tani, program SLPHT.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di Dunia, berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah populasi di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sekitar 270 juta, dengan luas wilayahnya pada tahun 2017 yaitu 1.913.578,68 km<sup>2</sup>, juga menjadi negara terluas ke 13 di Dunia. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian dan menjadi negara yang memanfaatkan pertanian sebagai basis utama prekonomian nasional, dan menjadi negara agraris terbesar se-asia setelah India dan China (Aryawati & Budhi, 2018).

Pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor pertanian khususnya yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi unggul untuk pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari penduduk pedesaan yang masih di bawah garis kemiskinan (Fitriyani, 2017). Namun menurut data dari BPS tahun 2019 tercatat sebanyak 49% Rumah tangga miskin bermata percaharian utama dari sektor pertanian. Untuk itu, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, terlebih makanan yang manusia makan sampai hari ini sekitar 98.8% berasal dari tanah yang kemudian dikelola (Kopittke et al., 2019). Sehubungan dengan itu perlu dilakukannya pemberdayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani menjadi Kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, Kelompok Tani diarahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, dan pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani (Ali et al., 2014).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013

tentang pedoman pembinaan kelembagaan Petani adalah salah satu peran Pemerintah dalam memberdayakan Petani, pada peraturan Menteri tersebut juga menjelaskan tentang pedoman penumbuhan pengembangan Kelompok Tani. Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan agar petani diatur dan ditata dalam wadah Kelompok Tani di tiap desa di tingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian (Ali et al., 2014). Kelompok Tani juga berfungsi sebagai media untuk belajar dan mengajar, sebagai media bekerjasama antar petani agar semakin produktif, juga sarana menambah pengetahuan, keterampilan, sikap dan ambisi (Karim et al., 2012).

Di kabupaten Bekasi, dari sekian banyaknya populasi petani yang bergabung kedalam kelompok tani, sekitar 70% menjadi Petani penggarap, Petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Biasanya modal untuk mengolah lahan pertanian berasal dari petani penggarap itu sendiri atau petani pemilik dengan upah yang diterima oleh petani penggarap adalah dalam bentuk bagi hasil dengan petani pemilik. Jadi antara petani pemilik dan petani penggarap terjadi kesepakatan (Novianti, et al, 2016). Namun hampir semua pemilik lahan berdomisili tidak di Kabupaten Bekasi, jauhnya jarak antara para Pemilik lahan dengan para Penggarap menjadi faktor penyebab para pemilik lahan tidak bisa atau tidak ingin memfasilitasi sarana prasarana, sedangkan para penggarap memiliki kemampuan yang terbatas. sehingga Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertanian perlu memberdayakan para petani melalui Kelompok Tani, terlebih hanya petani yang sudah bergabung ke kelompok tani saja yang akan mendapat bantuan dari Dinas Pertanian.

Kecamatan Pebayuran memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di

Kabupaten Bekasi, selain itu Kecamatan pebayuran memiliki luas lahan pertanian terbesar di Kabupaten Bekasi luasnya sebesar 7.262 hektar yang tersebar di Kecamatan Pebayuran. Luasnya lahan pertanian juga menjadi tantangan bagi Petani, masalah yang kerap terjadi di lahan pertanian adalah hama. Hama merupakan salah satu musuh terbesar para petani, hama dapat membuat kerugian bagi Petani, hama adalah penyebutan bagi semua hewan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman serta turunannya, diantaranya yaitu serangga hama (Nuraeni, 2017), semakin besar luas lahan pertanian, maka semakin banyak hamanya. Tentu hal ini menjadi perhatian Dinas Pertanian untuk memberdayakan Petani melalui program sekolah lapang pengendalian hama terpadu, dengan harapan para Kelompok Tani ini menjadi ahli PHT agar dapat mandiri dalam menangani hama.

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosio-ekonomi dan politik, serta mengembangkan pengaruh terhadap perbaikan lingkungan mereka (Edi Suharto, 2005).

Menurut Isbandi tahapan-tahapan dari pemberdayaan sebagai berikut (Adi, 2012):

1. Tahap Persiapan (Engagement). Pada tahap ini dilakukan melalui tahap penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.
  - a. Penyiapan petugas, merupakan penyiapan tenaga pemberdaya masyarakat yang dapat dilakukan oleh agen perubahan.
  - b. Penyiapan lapangan, dalam hal ini community worker atau agen perubahan pada

awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi.

2. Tahap Pengkajian (Assessment). Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat, misalnya dengan diskusi kelompok terfokus, curah pendapat ataupun nominal group process.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (Designing). Pada titik ini, tugas petugas pemberdaya sebagai penghubung harus diselesaikan dengan mengundang masyarakat untuk datang dan berbicara tentang masalah yang mereka alami dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diharapkan masyarakat mampu memunculkan berbagai alternatif program dan strategi. Dalam proses ini, Petugas berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat umum membahas dan mencermati program dan kegiatan yang layak dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan. Sebagai hasil dari aksi ini, program dan proyek yang

rencananya akan dilaksanakan oleh organisasi akan berkembang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh para donatur, sehingga mencegah munculnya program-program amal yang mungkin terbukti tidak efektif dalam jangka panjang.

4. Tahap Pemformulasian Rencana aksi. Pada fase ini, agen perubahan dapat membantu masyarakat mengembangkan dan memutuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada, terutama dalam hal saran, dan menulis ide. Selama tahap pengembangan rencana aksi, agen perubah dan masyarakat dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi). Tahap ini merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya bisa saja melenceng dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan apabila tidak ada kerjasama antara petugas dan atau anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat diharapkan menjadi kader dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
6. Tahap Evaluasi. Pada proses ini pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Sebagai hasil dari partisipasi warga dalam fase ini, diharapkan akan terbentuk sistem pemantauan internal di komunitas, sehingga sistem pemantauan masyarakat menjadi lebih "mandiri". Meskipun demikian, hasil evaluasi bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada banyak alasan mengapa hal ini bisa terjadi, dan jika memang demikian, diharapkan proses evaluasi akan memberikan informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk perbaikan program atau kegiatan tertentu. Artinya bila perlu dapat dilakukan kembali tahap pengkajian untuk menilai permasalahan yang telah dilaporkan oleh masyarakat atau sumber daya yang tersedia.
7. Tahap Terminasi. Pada tahap ini merupakan fase pemisahan formal dari komunitas sasaran. Berakhirnya program pemberdayaan masyarakat bukan karena masyarakat dapat dikatakan "mandiri", tetapi karena proyek perlu diselesaikan, jadwal telah terlampaui, atau anggaran telah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Namun tetap saja, para petugas harus perlahan-lahan meninggalkan komunitas

asaran, tidak secara tiba-tiba. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan oleh petugas secara sepihak.

## **METODE PENELITIAN**

Tempat dilakukannya penelitian adalah di Kecamatan Pebayuran pada tanggal 3 maret sampai 22 maret 2022, dengan narasumber seorang penyuluh dari desa Karangharja Kecamatan Pebayuran, dan juga para kelompok tani yang dibina dinas Pertanian sebagai peserta pelatihan program SLPHT.

Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, system pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Kualitatif deskriptif digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan, Sugiyono (2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahap Persiapan**

#### **a. Penyiapan Petugas**

Pada tahap ini Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Menyiapkan 2 Petugas untuk melaksanakan program SLPHT ini. Pertama, yang disiapkan yaitu penyuluh, tugas dari penyuluh ini yang nantinya datang ke setiap kelompok tani yang berada di Kecamatan Pebayuran untuk memperkenalkan kepada para petani apa itu program SLPHT dan apa saja manfaat yang akan didapat jika mengikuti program SLPHT. Kedua, yaitu Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Pertanian, yang bertugas sebagai untuk mengamati lahan pertanian,

memprediksi hal-hal yang akan terjadi pada lahan pertanian dan mencari solusi atas masalah dalam gangguan hama.

#### **b. Persiapan Lapangan**

Pada persiapan lapangan untuk program SLPHT ini hanya membutuhkan tempat untuk para penyuluh untuk mengadakan penyuluhan, pada tahap persiapan lapangan ini bukan Dinas Pertanian atau penyuluh yang menyiapkan namun tugas penyiapan lapangan diserahkan kepada anggota kelompok tani petani yang menjadi calon peserta Program SLPHT, untuk tempat pelaksanaan penyuluhan itu bermacam-macam mulai dari saung, sekretariat, bahkan rumah salah satu petani yang memadai untuk dijadikan penyuluhan.

## **2. Tahap Pengkajian**

Tahap pengkajian merupakan tahapan untuk melihat masalah yang dirasakan dan melihat potensi yang dimiliki calon peserta program SLPHT. Untuk melihat masalah atau kebutuhan yang dirasakan, sebelum melaksanakan program atau kegiatan, penyuluh mencoba berdiskusi melalui diskusi kelompok kepada para anggota kelompok tani dengan tujuan untuk melihat apa saja yang mereka butuhkan, pada tahap ini penyuluh mencoba memahami apa saja keluhan-keluhan yang ada pada petani.

Dinas Pertanian juga menghadirkan POPT yang bertujuan untuk melihat secara langsung ke lahan pertanian untuk mencari masalah yang dialami, jika dilihat di setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda, permasalahan yang berbeda ini disebabkan oleh jenis hama yang menyerang juga berbeda-beda. Selain itu untuk melihat potensi yang ada pada anggota kelompok tani, penyuluh mencoba untuk menguji para anggota kelompok tani dengan memberikan pertanyaan kepada para petani tentang penanganan yang mereka lakukan jika

hama menyerang tanaman, hal itu bertujuan untuk melihat tingkat pengetahuan para petani dalam menanggapi hama.

### **3. Tahap Perencanaan Program atau Kegiatan**

Setelah proses memahami apa saja permasalahan dan potensi yang ada pada anggota kelompok tani, penyuluh memberikan solusi kepada mereka bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, melihat setiap desa memiliki permasalahan, kebutuhan, dan tingkat pengetahuan yang berbeda maka solusi yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani di setiap desa juga berbeda. Petugas penyuluh juga memberikan ruang bagi para anggota kelompok tani untuk saling berdiskusi mengenai kegiatan yang akan mereka laksanakan. Pada tahap ini anggota kelompok tani yang menjadi calon peserta program SLPHT mengaku sangat antusias sekali untuk mengikuti program SLPHT.

### **4. Tahap Formulasi Rencana Aksi**

Pada tahap ini petugas penyuluh pertanian mencoba untuk membantu para anggota kelompok tani untuk menentukan apa saja kegiatan yang akan mereka laksanakan, perencanaan pelaksanaan kegiatan ini tentu akan berbeda disetiap desa karena mengingat setiap desa itu memiliki permasalahan yang berbeda atau jenis hama yang menyerang juga berbeda-beda, maka kegiatan yang akan dilaksanakan relatif berbeda-beda. Jika para anggota kelompok tani sudah menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan, petugas penyuluh akan Menyusun kontrak belajarnya atau kontrak kegiatan secara tertulis.

### **5. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap melaksanakan kegiatan yang

sebelumnya disusun dan direncanakan. Sesuai dengan jadwal pada kontrak belajar, penyuluh dan POPT langsung menuju lokasi anggota kelompok tani yang akan mengikuti penyuluhan dan pelatihan. Namun sebelum itu penyuluh sudah menghubungi ketua kelompok tani untuk menyiapkan tempat untuk dilaksanakannya penyuluhan.

Jika semua anggota kelompok tani ini sudah hadir maka penyuluhan pun dimulai. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama satu musim tanam baik itu musim hujan atau musim kemarau. Pada satu musim ini ada 14 kali pertemuan. Pelatihannya terdiri dari cara menanggapi hama yang menyerang, bagaimana penggunaan pestisida agar tidak merusak tanaman, dan memperkenalkan kepada peserta mengenai hewan apa saja yang dapat merusak tanaman dan tidak merusak tanaman. Pada pertemuan terakhir para peserta diharapkan untuk mempraktikkan hasil latihan yang telah diajarkan oleh petugas di lahan pertanian. Selain penyuluhan dan pelatihan, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi juga memberikan sejumlah bantuan berupa pestisida dan alat semprot kepada kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Pebayuran, bantuan pestisida ini akan diberikan apabila hama menyerang dan jumlah pestisida yang diberikan pun tergantung luas lahan keseluruhan dari kelompok tani yang lahannya diserang hama.

### **6. Tahap Evaluasi**

Proses evaluasi program ini dilaksanakan oleh petugas penyuluh dan POPT berupa kegiatan pengecekan secara berkala setiap seminggu sekali pada lahan pertanian. Pada evaluasi ini petugas dan POPT mengecek intensitas hama yang menyerang pada lahan pertanian dan pengecekan kesehatan pada tanaman melalui bertanya kepada petani dan mengamati secara langsung ke lahan pertanian. Selain itu pengecekan

juga tidak hanya pada intensitas hama yang menyerang tanaman petugas penyuluhan dan POPT juga melakukan pengecekan terhadap petani yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan, pengecekan berupa melihat para petani apakah menerapkan ilmu yang telah diajarkan dipelatihan atau tidak, kedua pengecekan tersebut bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan program.

Petani yang telah mengikuti pelatihan juga ikut serta dalam tahap evaluasi program, pengecekan lahan pertanian juga dilakukan oleh petani, mulai dari pengecekan intensitas hama yang menyerang juga pengecekan kesehatan pada tanaman. Petugas dan Petani memiliki peran yang sama pada tahap evaluasi ini, namun perbedaan yang mencolok adalah jumlah pengecekan ke lahan pertanian, para petani jauh lebih banyak melakukan pengecekan karena memang selain lebih mudah dijangkau oleh petani, para petani juga memiliki waktu yang lebih banyak daripada petugas.

### **7. Tahap Terminasi**

Tidak ada tahap terminasi atau perpisahan secara resmi pada program ini, program SLPHT ini akan selalu berjalan, walaupun telah selesai penyuluhan dan evaluasi program akan terus berlanjut.

### **8. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung pada program SLPHT ini, Pertama, yaitu tingkat antusias dari para anggota kelompok tani, hal ini yang memudahkan petugas penyuluh untuk melaksanakan program SLPHT.

Kedua, rata-rata dari peserta program SLPHT ini memiliki tingkat solidaritas yang tinggi mereka sesama petani saling membantu satu sama lain, saling mengajari pada sesama anggota kelompok yang belum paham tentang materi yang diajarkan oleh petugas penyuluh.

### **9. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang dialami yaitu pertama, jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan pebayuran ini terbatas, idealnya satu desa memiliki satu penyuluh namun yang terjadi adalah menurut data pada tahun 2020 jumlah petugas penyuluh di Kecamatan Pebayuran yang memiliki 13 desa ini berjumlah 7 orang, artinya setiap penyuluh yang bertugas di Pebayuran ini rata-rata menanggung 2 desa. Mereka para petugas penyuluh merasa kewalahan dalam melaksanakan program SLPHT.

Kedua, bencana alam juga merupakan penghambat, di Pebayuran ini bencana alam yang terjadi yaitu banjir yang menyebabkan gagal panen atau tertundanya penyuluhan dan pelatihan. Ketiga, Mengingat bahwa para petani ini tidak hanya bekerja sebagai petani, banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Karena hal ini, terkadang ada beberapa petani yang tidak bisa hadir dalam pelatihan karena sedang bekerja diluar dari hal pertanian.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pada 7 tahapan-tahapan beserta faktor pendukung dan penghambat pada program SLPHT, peneliti menyimpulkan bahwa program yang dilaksanakan sudah cukup baik dan memberikan manfaat kepada para anggota kelompok tani yang mengikuti program SLPHT

Namun faktor yang menghambat dalam proses pemberdayaan ini adalah jumlah petugas penyuluh yang terbatas, bencana alam seperti banjir, dan para petani yang memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi petani yang menyebabkan petani sulit untuk ditemui oleh petugas Ketika adanya pelatihan dan evaluasi program.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang maha esa yang telah melancarkan peneliti selama mencari data-data. Tidak lupa kepada Orang Tua Peneliti yang telah mendukung Peneliti selama pembuatan artikel ini, dan juga kepada pihak-pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu karena telah memberikan data-data agar peneliti bisa membuat artikel ini.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D.* alfabeta.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, S., Idris, M., & Parawangi, A. (2014). *Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.* Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Aryawati, N. P. R., & Budhi, M. K. S. (2018). *Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali.* E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 7(9), 1918–1952.

Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Refika Aditama.

Fitriyani, J. (2017). *Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.* Agrotekbis.

Isbandi Rukminto Adi. (2012). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis.* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Karim, I., Handayawati, H. S., & Ruminarti, W. (2012). *Empowerment of Farmer Group in Improving Chilli Farming Income in Kerinci District, Indonesia. Empowerment of Farmer Group in Improving Chilli Farming Income in Kerinci District, Indonesia,* 15(1), 6–11.

Kopittke, P. M., Menzies, N. W., Wang, P., McKenna, B. A., & Lombi, E. (2019). *Soil and the intensification of agriculture for global food security.* *Environment International International,* 132(August).

Nuraeni, Y. (2017). *Keanekaragaman serangga yang berpotensi hama pada tanaman kehutanan.* <http://eprints.uai.ac.id/26/1>.